



PEMERINTAH PROVINSI  
SULAWESI BARAT

**RENCANA KERJA  
(RENJA)**

TAHUN ANGGARAN 2024

INSPEKTORAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT  
TAHUN 2022

Inspektorat Daerah  
Provinsi Sulawesi Barat  
Tahun 2023

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	0
DAFTAR ISI .....	i
SURAT KEPUTUSAN .....	ii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II    HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU</b>	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2023 dan Capaian Renstra Periode 2017-2022 .....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat.....	7
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat .....	7
2.4. Reviuw terhadap rancangan awal RKPD .....	7
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	7
<b>BAB III    TUJUAN, SASARAN INSPEKTORAT</b>	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	8
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat .....	8
3.3 Program dan Kegiatan .....	9
<b>BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	
4.1 Renja dan Pendanaan Inspektorat Daerah .....	10
<b>BAB V    PENUTUP</b>	
5.1 Penutup.....	14

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Sesuai dengan INPRES Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Rencana Kerja sangat penting dalam perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian, Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Renja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik.

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat ( Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95), serta Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 24). untuk mengoptimalkan dan merealisasikan Tugas Pokok dan Fungsinya, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan mengacu pada Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 yang mampu menterjemahkan tugas pokok dan fungsi dimaksud, memuat Tujuan, Sasaran, kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (Renstra).

Dengan disusunnya RKT Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 diharapkan dapat memandu pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta mengukur kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Dalam menyusun RENJA Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, maka pedoman hukum yang digunakan adalah :

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
3. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005–2025;
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026)
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050–5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
  22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2005 – 2025;
  23. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 ;
  24. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **a. Maksud**

Sebagai acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dalam melakukan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagaimana telah diamanahkan dalam aturan yang berlaku.

b. Tujuan

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun.
2. Untuk menjamin adanya kesesuaian serta konsistensi perencanaan dan program.
3. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan pada tahun-tahun yang akan datang.

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **Bab II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2022 dan Capaian Renstra Periode 2017-2022
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat
- 2.4 Reviuw terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **Bab III TUJUAN, SASARAN INSPEKTORAT**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat
- 3.3. Program dan Kegiatan

### **Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **Bab V PENUTUP**

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022**

**II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA 2017-2022**

Perencanaan Kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020 tercermin dalam pencapaian sasaran, indikator dan target yang akan dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan.

**Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan  
Inspektorat APBD Tahun Anggaran 2022**

<b>Kode Rek.</b>	<b>PROGRAM dan KEGIATAN</b>	<b>NILAI PAGU (Rp)</b>	<b>NILAI REALISASI (Rp)</b>	<b>%</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
6.01	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan			
<b>6.01.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>12.819.895.037</b>	<b>12.655.985.640</b>	<b>98,72%</b>
6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	159.260.500	159.194.340	99,97%
6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.505.386.000	9.354.782.741	98,42%
6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	27,653,200	27.619.163	99,88%
6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	594,316,000	587.012.756	98,61%
6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	704,718,307	704.542.570	99,99%
6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	986,187,900	984.675.018	99,96%



6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	357,890,630	354.650.630	100%
6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	484,482,500	483.518.422	99,96%
<b>6.01.02</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>3,643,824,827</b>	<b>3.630.972.394</b>	<b>99,65%</b>
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2,469,998,227	2.457.881.137	99,82%
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1,173,826,600	1.173.091.257	99,67%
<b>6.01.03</b>	<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi</b>	<b>856,362.100</b>	<b>854.308.100</b>	<b>99,76%</b>
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	158,394.200	157.572.180	99,44%
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	697,967,000	696.735.920	99,82%
	<b>TOTAL</b>	<b>17,320,081,964</b>	<b>17.141.266.134</b>	<b>98,97%</b>

Sumber : SPJ Belanja - Fungsional Bendahara Pengeluaran, per 31 Desember 2022

**Tabel 3.4**  
**Rekapitulasi Barang ke Neraca T.A. 2022**

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
<b>1.3</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>Rp. 8.113.082.269,45</b>
1	Tanah	Rp. 0,-
2	Peralatan dan Mesin	Rp. 4.090.377.923,00
3	Gedung dan Bangunan	Rp. 4.042.704.346,45
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 0,-
5	Aset Tetap Lainnya	Rp. 0,-
6	Konstruksi dalam pengerjaan	Rp. 0,-
	Aset Tidak Berwujud	Rp. 0,-
	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>Rp. 1.146.873.520,19</b>
	Aset Kondisi Rusak Berat / Usang	Rp. 1.166.873.520,19

Sumber : Pengurus Barang Inspektorat, per 31 Desember 2022

**Rincian Alokasi Anggaran 2022 berdasarkan jenis belanja**

		Pagu	Realisasi	%	SiLPA
<b>Gaji</b>		9,451,384,000	9,300,955,241	98,41%	150,428,759
<b>Operasional</b>					
a	Rutin	3.368,510,537	3.355.030.399	99,60%	13,480,138
b	Teknis	4.500.186,927	4.485.280.494	99,67%	14,906,433
<b>SiLPA</b>					
a	Gaji	150.429.259			
b	Penghematan Anggaran	24.608.189	Sisa belanja kegiatan rutin dan efisiensi belanja perjalanan dinas luar daerah, kegiatan Satgas Saber Pungli dan Honorarium Tim Percepatan Penyerapan APBD 2022		
c	Sisa Kontrak Pengadaan	4,318,382	Adanya perubahan metode pengadaan dari pengadaan langsung ke e-purchasing		

## APBN Tahun 2022

Pagu sebesar Rp. 172.814.000.- dengan Realisasi sebesar Rp. 172.591.416,- atau 99,87%

Demi efektifitas dan efisiensi anggaran selama melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Provinsi Sulawesi Barat, sudah melakukan Revisi DIPA sebanyak 2 (dua) kali, sebagaimana terlampir pada tabel dibawah ini:

### Daftar Revisi DIPA

No	No. DIPA	Revisi ke	Tanggal Revisi	Pagu
1	SP DIPA-010.04.3.484191/2022	0	17-11-2021	195.638.000,-
2	SP DIPA-010.04.3.484191/2022	1	08-06-2022	172.814.000,-
3	SP DIPA-010.04.3.484191/2022	2	11-10-2022	172.814.000,-

Berdasarkan data *e*-SPM Kementerian Dalam Negeri yang diakses pada laman <https://spm.bangda.kemendagri.go.id> pada tanggal 14 Desember 2022 diketahui capaian sementara SPM Kabupaten/ Kota se-Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

No	Urusan	Capaian Sementara Masing-Masing Kabupaten (%)					
		Mamuju	Majene	Polewali Mandar	Mamasa	Mamuju Tengah	Pasangkayu
1	Pendidikan	91,67	100,00	100,00	8,33	66,67	58,33
2	Kesehatan	86,18	95,93	91,87	53,66	80,49	86,99
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	91,67	50,00	66,67	0,00	16,67	75,00
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100,00	11,11	55,56	0,00	55,56	55,56
5	ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	85,19	14,81	55,56	0,00	55,56	81,48
6	Sosial	87,14	7,14	24,29	14,29	92,86	74,29

### Realisasi Belanja

No	BA-Satker	Nama Satker	Ket	Jenis Belanja		Total
				Pegawai	Barang	
1	010-484191	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT	Pagu	0	172.814.000	172.814.000
			Realisasi	0	172.591.416	172.591.416
			Persentase	0.00%	(99,87%)	(99,87%)
			Sisa	0	222.584	222.584

### Rincian Belanja

No	Mata Anggaran Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Pagu (Rp)
1	484191.178.521115.01004CM.1237PBL. A000000001.00000.3.3400.2.000000.000000	36.440.000	36.440.000	
2	484191.178.521211.01004CM.1237PBL. A000000001.00000.3.3400.2.000000.000000	23.750.000	23.750.000	
3	484191.178.521213.01004CM.1237PBL. A000000001.00000.3.3400.2.000000.000000	0	0	
4	484191.178.521241.01004CM.1237PBL. A000000001.00000.3.3400.2.000000.000000	2.400.000	2.400.000	
5	484191.178.522151.01004CM.1237PBL. A000000001.00000.3.3400.2.000000.000000	3.600.000	3.600.000	
6	484191.178.524111.01004CM.1237PBL. A000000001.00000.3.3400.2.000000.000000	98.254.000	98.031.416	222.584
7	484191.178.524114.01004CM.1237PBL. A000000001.00000.3.3400.2.000000.000000	8.370.000	8.370.000	
	<b>Jumlah</b>	<b>172.814.000</b>	<b>172.591.416</b>	<b>222.584</b>

#### II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT

Terlampir

#### II.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT

No.	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/	Lain-Lain
1.	Perkembangan Teknologi dan Informasi yang begitu cepat	Perubahan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat sebagai quality assurance bagi SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, (contoh : Bedah DPA-SKPD)	Dana Desa, Sapu Bersih Pungutan Liar dan Dana BOS
		Penerapan audit terhadap barang dan jasa maupun hal-hal lain yang memiliki sifat menyentuh dan mempunyai pengaruh kepada masyarakat besar dilakukan suatu audit yang dikenal "Probity Audit"	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	
		Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Predikat SAKIP, Peringkat LPPD, Tingkat Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP		

#### II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RPKD

Rancangan awal Rencana Kerja telah direview oleh BAPPEDA Provinsi Sulawesi Barat

## II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Tidak terdapat usulan program dan kegiatan masyarakat

### **BAB III TUJUAN, SASARAN INSPEKTORAT**

#### **3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

1. BPKP sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Auditor agar menyiapkan Bank Data berbasis Teknologi Informasi yang dapat diinput oleh masing-masing Auditor seluruh Indonesia, sehingga selain Auditor itu sendiri dapat *update* dan memperoleh informasi, juga bermanfaat bagi unsur pimpinan untuk melihat bezetting Auditor di wilayahnya.
2. Pengawasan mandatory terhadap pengelolaan Dana BOS, Dana Desa dan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) perlu mendapatkan perhatian dari instansi pusat terkait, untuk memberikan bantuan alokasi anggaran ke Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta bimbingan berupa Diklat/Bimtek dsb, bagi Aparatur Pengawas Intern Pemerintah.
3. Perlu *sharing* data antar K/L/D/I yang dibutuhkan oleh APIP berkaitan percepatan peningkatan Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP.
4. Perlu *Reward and Punishment* bagi Unit Kerja terkait tingkat respon dan realisasi masing-masing OPD atas setiap rekomendasi hasil pemeriksaan.

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran**

Peran pengawasan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, sekaligus memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap potensi penyimpangan dan kecurangan yang terjadi yang disebabkan kelemahan dalam sistem

maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu. Dengan demikian akan meningkatkan kepercayaan publik (*public trust*) terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Atas dasar pemikiran tersebut Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat merumuskan Keselarasan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :



Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sul-Bar 2023-2026		Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sul-Bar 2023-2026	
<b>Tujuan : 4</b>	<b>Sasaran : 9</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
4. Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	9. Menguatnya manajemen kinerja dalam sistem pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	1. Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur pengawas	1. Meningkatnya Kapabilitas Fungsional Pengawas
		2. Meningkatnya kapasitas pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme	2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan

### 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2022

Kode MAK	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan
1	2	3	4	5
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Mamuju	Nilai SAKIP Lingkup SKPD	80
6.01.01.1.01	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD	25
6.01.01.1.01.01	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mamuju	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Dokumen

6.01.01.1.01.02	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun	Dokumen
6.01.01.1.01.03	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun	Dokumen
6.01.01.1.01.04	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun	Dokumen
6.01.01.1.01.05	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun	Dokumen
6.01.01.1.01.06	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun	Laporan
6.01.01.1.01.07	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Dokumen
<b>6.01.01.1.02</b>	<b>- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Mamuju</b>	<b>Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD</b>	<b>%</b>
6.01.01.1.02.01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Mamuju	Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya	Orang
6.01.01.1.02.02	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Mamuju	Persentase Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang Disediakan	Persen
6.01.01.1.02.07	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang Tersusun	Laporan
<b>6.01.01.1.03</b>	<b>- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Mamuju</b>	<b>Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD</b>	<b>Persen</b>
6.01.01.1.03.02	- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Mamuju	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang Diasuransikan	Unit
<b>6.01.01.1.05</b>	<b>- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Mamuju</b>	<b>Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD</b>	<b>Persen</b>
6.01.01.1.05.02	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Mamuju	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan	Pasang
6.01.01.1.05.09	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Mamuju	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang
6.01.01.1.05.10	- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Mamuju	Persentase Keikutsertaan pada Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Persen
6.01.01.1.05.11	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Mamuju	Persentase Keikutsertaan pada Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Persen
<b>6.01.01.1.06</b>	<b>- Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Mamuju</b>	<b>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD</b>	<b>Persen</b>
6.01.01.1.06.01	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Mamuju	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis
6.01.01.1.06.04	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mamuju	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jenis
6.01.01.1.06.05	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Mamuju	Jumlah Barang yang Dicitak dan Digandakan	Jenis
6.01.01.1.06.06	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Mamuju	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jenis
6.01.01.1.06.07	- Penyediaan Bahan/Material	Mamuju	Jumlah Jenis Bahan/Material yang Disediakan	Jenis
6.01.01.1.06.09	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen
<b>6.01.01.1.07</b>	<b>- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Mamuju</b>	<b>Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persen</b>
6.01.01.1.07.01	- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mamuju	Jumlah Mobil Jabatan yang Diadakan	Unit
6.01.01.1.07.02	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mamuju	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan	Unit
6.01.01.1.07.05	- Pengadaan Mebel	Mamuju	Jumlah Jenis Mebeleur yang Diadakan	Jenis
6.01.01.1.07.10	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang Diadakan	Unit
<b>6.01.01.1.08</b>	<b>- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Mamuju</b>	<b>Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persen</b>
6.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mamuju	Persentase Surat Menyurat yang Dikelola	Persen
6.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Mamuju	Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan	Rekening Tagihan

6.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Mamuju	Jumlah Jenis Layanan Umum Kantor yang Disediakan	Jenis
<b>6.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Mamuju	<b>Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persen</b>
6.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mamuju	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit
6.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mamuju	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit
6.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit
6.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit
<b>6.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	Mamuju	<b>Opini BPK atas penyajian laporan keuangan penda</b>	<b>WTP</b>
<b>6.01.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	Mamuju	<b>Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan</b>	<b>Laporan</b>
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Reviu	Laporan
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Reviu	Laporan
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Mamuju	Jumlah Kerjasama Pengawasan	Laporan
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Monev	Laporan
<b>6.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	Mamuju	<b>Persentase pengaduan masyarakat yang memenuhi syarat selesai ditindaklanjuti</b>	<b>Laporan</b>
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan
<b>6.01.03</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	Mamuju	<b>Persentase pengaduan masyarakat memenuhi syarat yang ditindaklanjuti</b>	<b>Persen</b>
<b>6.01.03.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	Mamuju	<b>Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan</b>	<b>Dokumen</b>
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Mamuju	Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan	Dokumen
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Mamuju	Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan	Dokumen
<b>6.01.03.2.02</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	Mamuju	<b>% perangkat daerah mendapatkan pelayanan asistensi dan pendampingan</b>	<b>%</b>
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Mamuju	Jumlah Laporan yang terbit	Laporan
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Mamuju	Jumlah Laporan yang terbit	Laporan
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Mamuju	Jumlah Laporan yang terbit	Laporan
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Mamuju	Jumlah Laporan yang terbit	Laporan

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2024**  
**DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025**  
**PROVINSI SULBAR**

Kode MAK	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024 (N)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
<b>6.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Mamuju</b>	<b>Nilai SAKIP Lingkup SKPD</b>	<b>Nilai</b>	<b>80</b>	<b>13,712,976,255</b>
<b>6.01.01.1.01</b>	<b>- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Mamuju</b>	<b>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD</b>	<b>Nilai</b>	<b>25</b>	<b>208,005,320</b>
6.01.01.1.01.01	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mamuju	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	50,000.000
6.01.01.1.01.02	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	25.000.000
6.01.01.1.01.03	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	25.000.000
6.01.01.1.01.04	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	18.005.320
6.01.01.1.01.05	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	30.000.000
6.01.01.1.01.06	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	30.000.000



6.01.01.1.01.07	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mamuju	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	7	30.000.000
<b>6.01.01.1.02</b>	<b>- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Mamuju	<b>Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>10,116,441,480</b>
6.01.01.1.02.01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Mamuju	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	97	10,036,441,480
6.01.01.1.02.02	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	100%	30,000,000
6.01.01.1.02.07	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	50,000,000
<b>6.01.01.1.03</b>	<b>- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Mamuju	<b>Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>50,000,000</b>
6.01.01.1.03.02	- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Mamuju	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	50,000,000
<b>6.01.01.1.05</b>	<b>- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Mamuju	<b>Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>790,408,000</b>
6.01.01.1.05.02	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Mamuju	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	202,550,000
6.01.01.1.05.09	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Mamuju	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	15	400,000,000
6.01.01.1.05.10	- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Mamuju	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	15	137,858,000
6.01.01.1.05.11	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Mamuju	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	15	50,000,000
<b>6.01.01.1.06</b>	<b>- Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Mamuju	<b>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>744,841,925</b>
6.01.01.1.06.01	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Mamuju	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	7.001.700
6.01.01.1.06.04	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mamuju	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	100.001.000

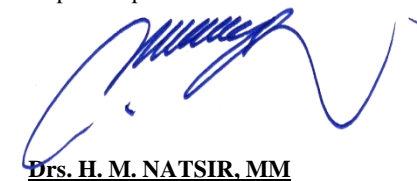
6.01.01.1.06.05	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Mamuju	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	25.000.000
6.01.01.1.06.06	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Mamuju	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	2.000.000
6.01.01.1.06.07	- Penyediaan Bahan/Material	Mamuju	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	109.839.225
6.01.01.1.06.08	- Fasilitasi Kunjungan Tamu	Mamuju	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1.000.000
6.01.01.1.06.09	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mamuju	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	500.000.000
<b>6.01.01.1.07</b>	<b>- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Mamuju	<b>Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>841,574,100</b>
6.01.01.1.07.01	- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mamuju	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	500.000.000
6.01.01.1.07.02	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mamuju	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	50,000,000
6.01.01.1.07.05	- Pengadaan Mebel	Mamuju	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	91.574.100
6.01.01.1.07.11	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	200.000.000
<b>6.01.01.1.08</b>	<b>- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Mamuju	<b>Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>361,705,430</b>
6.01.01.1.08.01	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	35,000,000
6.01.01.1.08.02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	81.905.430
6.01.01.1.08.04	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	244.800.000
<b>6.01.01.1.09</b>	<b>- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Mamuju	<b>Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>600,000,000</b>

6.01.01.1.09.01	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mamuju	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	200.000.000
6.01.01.1.09.02	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mamuju	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	100.000.000
6.01.01.1.09.09	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	200.000.000
6.01.01.1.09.10	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mamuju	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	100.000.000
<b>6.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	Mamuju	<b>Level Kapabilitas APIP</b>	<b>Level</b>	<b>3</b>	<b>4,027,331,609</b>
<b>6.01.02.1.01</b>	- Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan	349	<b>2,679,313,009</b>
6.01.02.1.01.01	- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	84	1,309,777,782
6.01.02.1.01.02	- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	84	358.732.227
6.01.02.1.01.03	- Reviu Laporan Kinerja	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	84	303.245.000
6.01.02.1.01.04	- Reviu Laporan Keuangan	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	84	167.326.000
6.01.02.1.01.05	- Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Laporan	6	50,000,000
6.01.02.1.01.06	- Kerjasama Pengawasan Internal	Mamuju	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	50,000,000
6.01.02.1.01.07	- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Mamuju	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	6	440.232.000
<b>6.01.02.1.02</b>	- Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Mamuju	Persertase pengaduan masyarakat yang memenuhi syarat selesai ditindaklanjuti	Laporan	13	<b>1,348,018,600</b>
6.01.02.1.02.01	- Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Mamuju	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	1	200,000,000

6.01.02.1.02.02	- Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Mamuju	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	12	1.148.018.600
<b>6.01.03</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	Mamuju	<b>Persertase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan</b>	<b>Persen</b>	<b>80%</b>	<b>1.300,000,000</b>
<b>6.01.03.1.01</b>	- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Mamuju	Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan	Dokumen	2	<b>300,000,000</b>
6.01.03.1.01.01	- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Mamuju	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	1	200,000,000
6.01.03.1.01.02	- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Mamuju	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	1	100,000,000
<b>6.01.03.1.02</b>	- Pendampingan dan Asistensi	Mamuju	% perangkat daerah mendapatkan pelayanan asistensi dan pendampingan	%	100%	1.000,000,000
6.01.03.1.02.01	- Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Mamuju	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	42	100,000,000
6.01.03.1.02.02	- Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Mamuju	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	42	100,000,000
6.01.03.1.02.03	- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Mamuju	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	12	700,000,000
6.01.03.1.02.04	- Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Mamuju	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	42	100,000,000
<b>TOTAL</b>						<b>19,040,307,864</b>

Mamuju, 19 Juni 2023

Kepala Inspektorat



**Drs. H. M. NATSIR, MM**

Pangkat, Gol. : Pembina Utama Madya

NIP : 19661231 198603 1 116

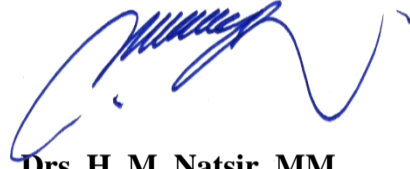
## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah. Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024, berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja, dan digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu Tahun Anggaran bagi seluruh jajaran Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.

Demikian Rencana Kerja ini dibuat. Semoga dapat memenuhi harapan kita semua untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan bersih.

Mamuju, 19 Juni 2023

**Kepala Inspektorat**



**Drs. H. M. Natsir, MM**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP : 19661231 198603 1 116